



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejati Didesak Periksa Eks Pimpinan Dewan

Polemik Tak Kembalikan Mobnas

BENGKULU, BE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu didesak untuk segera memanggil 7 orang mantan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu yang telah membawa mobil dinas (mobnas) tanpa ketentuan. Dalam rencana pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang dilakukan, Kejati bisa langsung memeriksa eks pimpinan dewan, atas ketersengajaan membawa mobnas, setelah masa jabatan pimpinan dewan selesai.

"Buktinya sudah jelas, ada aset mobnas yang sudah lama tidak dikembalikan oleh mantan pimpinan dewan. Artinya eks pimpinan dewan itu bisa langsung dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi," terang Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Melyan Sori kepada BE, kemarin (8/1).

Dijelaskannya, untuk melakukan pemeriksaan, Kejati tidak perlu harus menunggu laporan dari masyarakat masuk, maupun laporan dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sebagai pemilik aset. Kejati bisa langsung melakukan tindakan, dengan bukti yang telah diketahui oleh publik saat ini.

"Jadi tidak perlu ada laporan bukti sudah kuat dipublik. sudah mengakui, artinya, bisa dulu baru bertindak. Sekarang Mantan pimpinan dewan langsung melakukan tindakan,"

tambahnya.

Menurut Melyan, eks pimpinan dewan yang tidak mengembalikan mobnas itu sudah jelas merugikan negara. Apalagi sudah bertahun-tahun mobnas itu digunakan. Aset bergerak itu dipastikan akan mengalami penyusutan secara nilai mobnas. Apalagi ada mobnas yang tidak dilakukan perawatan. "Negara jelas dirugikan. Karena lama kelamaan, aset itu nilainya menjadi menyusut," ungkap Melyan.

Pemeriksaan kepada eks pimpinan dewan itu harus dilakukan secara keseluruhan. Baik yang belum mengembalikan, ataupun yang sudah mengembalikan aset negara yang sudah dikuasai

tidak sesuai peruntukan itu. Mobnas yang sudah dikembalikan juga harus diperiksa secara detail. Jangan sampai mobnas tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi awal mobnas itu diberikan mantan pimpinan dewan. "Panggil semua, termasuk yang sudah mengembalikan mobnas," paparnya.

Keseriusan Kejati untuk turun tangan membantu pemprov menertibkan aset yang dikuasai mantan pejabat, harus benar-benar konsisten. Jangan sampai, rencana Kejati itu hanya untuk menakut-nakuti para mantan pimpinan dewan, agar mengembalikan mobnas tersebut.

"Jadi memang harus serius dan tegas. Jangan hanya

menakut-nakuti. Harus ada konsekuensi tegas kepada para mantan pejabat yang menguasai aset pemerintah," tegas Melyan.

Tidak hanya itu, Melyan juga menyindir pimpinan dewan provinsi saat ini yang sudah mendapatkan mobnas baru, untuk mengembalikan segera mobnas yang lama. Jangan sampai hal tersebut nantinya juga menjadi temuan pihak penegak hukum.

"Malu lah, kalau pejabat kita membawa aset yang tidak sesuai aturan. Harusnya wakil rakyat itu memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya. Bukan buat malu," tandasnya.

Untuk diketahui, mobnas yang belum dikembalikan oleh mantan pimpinan dewan

antara lain Patrice Rio Capella mobnas Fortuner, Suwardi Bahrun (Mantan Ketua DPRD Provinsi 2004-2009 kuasai Mitsubishi L 200 Strada Lama nopol BD 9061 AY dan Mitsubishi Pajero BD 1262 CY. Lalu almarhum Kurnia Utama (Mantan Ketua DPRD Provinsi 2009-2014) kuasai Fortuner BD 1278 CY, Elmi Supiati (Mantan Waka I) Mitsubishi Pajero Sport 2 5D nopol BD 1563 CY, Edison Simbolon (Mantan Waka I) kuasai tiga mobnas Mitsubishi Pajero Sport 2 5D nopol BD 6, Kijang Inova E STD BD 1637 AY, Toyota Rush S BD 1610 CY. Terakhir, Elvi Hamidi (Mantan Waka III) yang kuasai mobnas jenis Mitsubishi Pajero Sport 2 5D. (151)